

Obat Generik Tak Laku

Pemerintah dinilai tak bernyali menghadapi industri farmasi.

JAKARTA — Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan Setiawan Soeparan mengatakan, konsumsi obat generik selama tiga bulan pertama 2010 hanya naik 2-3 persen. Padahal, kata dia, sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 038 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Penulisan Resep Obat Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan.

“Sudah ada edukasi di tingkat layanan kesehatan pemerintah, tapi kesulitan pada tingkat sanksi,” ujar Setiawan dalam diskusi obat di Jakarta kemarin.

Berdasarkan evaluasi Kementerian Kesehatan pada Februari-April 2010, setelah adanya peraturan itu, persepsi obat generik di layanan kesehatan milik pemerintah naik dari 65 persen menjadi 67 persen. Itu pun 90 persennya diresepkan oleh tenaga medis di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). “Di rumah sakit, baru sekitar 45-50 persen yang meresepkan.”

Dia mengakui peraturan itu belum menetapkan sanksi tegas bagi dokter yang tidak meresepkan obat generik. Dia mengatakan, untuk menjatuhkan sanksi, Kementerian Kesehatan terbentur masalah teknis, seperti apakah semua resep harus obat generik, apakah obat generik hanya diberikan pada perawatan pertama, atau bagaimana jika pasien sendiri memilih campuran obat generik dan obat bermerek.

Dia mengakui, masyarakat,



Pertemuan Bilateral

Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Korea Pak Ui-chun (kanan) didampingi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa (kiri) sehubungan pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, kemarin.

tenaga medis, dan instansi kesehatan masih memandang sebelah mata terhadap obat generik. “Padahal khasiatnya sama,” kata Setiawan.

Program obat seharga Rp 1.000 yang dicanangkan pemerintah sejak Juni 2007 pun mangkrak di gudang-gudang perusahaan obat badan usaha milik negara. “Kalau tidak digunakan, kurang lebih 1,5-2 tahun lagi akan kedaluwarsa,” kata staf ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Chalik Masulili.

Dengan keuntungan 15 persen dari harga obat (Rp 150), kata Chalik, banyak obat generik hanya diberikan pada perawatan pertama, atau bagaimana jika pasien sendiri memilih campuran obat generik dan obat bermerek.

Farmakolog dari Fakultas

Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Iwan Dwi Prahasto, mengatakan banyak keanehan harga obat di Indonesia. “Harga obat bermerek bisa sama dengan harga obat paten, bahkan bisa 50-60 kali lebih mahal dari obat generik,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Padahal, kata dia, harga obat bermerek yang diproduksi setelah masa paten habis (15-20 tahun) bisa 60 persen lebih murah karena sudah tak perlu membayar paten.

Sayangnya, kata dia, faktanya, obat generik yang berbahan baku sama dengan obat bermerek tidak laku dan sulit didapat. “Pemerintah tak bernyali menghadapi industri farmasi,” kata dia.

Dia mengatakan, obat generik hanya berdaya di tingkat puskesmas, tapi tak bergi-

gi di rumah sakit pemerintah, apalagi rumah sakit swasta.

Menurut dia, situasi ini diperparah oleh sikap tenaga medis. “Kenapa dokter lebih senang meresepkan obat bermerek? Bukan rahasia lagi, ada insentif tak kasatmata di balik persepsi tersebut,” ujarnya. ● DIANING SARI

KPI Minta Tayangan Gosip Dihilangkan Saat Ramadan

JAKARTA — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta televisi swasta menggeser tayangan infotainment dari siang hari ke malam hari untuk menghormati ibadah puasa. Ketua KPI Dadang Rahmat Hidayat mengatakan, program yang digeser itu adalah yang berisi *ghibah*, mengungkap aib, dan tidak berkaitan dengan kepentingan umum.

“Dengan isi seperti sekarang, bukan hanya dipindah, tapi juga dihilangkan,” kata dia kepada *Tempo* kemarin.

Dadang memuji langkah stasiun televisi ANTV tidak lagi menayangkan acara gosip “Espresso”.

KPI juga meminta stasiun televisi mengatur tayangan yang bisa mengganggu puasa, seperti iklan minuman. “Kalau bisa, jangan waktu siang,” ujar Dadang.

Acara lain yang disorot KPI adalah program hiburan waktu sahur. “Kami harap jangan terlalu banyak,” katanya. Stasiun televisi, kata dia, bisa mengisi acara dinihari itu dengan tayangan yang lebih mendidik dan bermanfaat.

KPI akan bertemu dengan sepuluh stasiun televisi swasta untuk membahas ihwal tayangan Ramadan di kantor KPI, siang ini. Pertemuan juga akan membahas soal revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. “Kami ingin Ramadan jadi momentum perbaikan tayangan lembaga penyiaran, jadi seperti bulan puasa terus,” kata Dadang.

Pada Ramadan dua tahun lalu, KPI juga menyampaikan imbauan serupa, yaitu menghentikan ekspose karakter banci di televisi. Meski tidak menghapus total pria-pria gemulai dari layar kaca, imbauan itu berhasil mengurangi frekuensi tayangan dengan karakter kebancian-bancian. Kedua imbauan ini berawal dari satu sumber, yakni fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang sama-sama mengharamkan banci dan mempergunjingkan orang lain. ● REZA M

Menteri Agama Bantah Selewengkan Dana Umat

JAKARTA — Menteri Agama Suryadharma Ali menolak tuduhan bahwa Kementerian Agama menggunakan Dana Abadi Umat (DAU) untuk kepentingan kalangan tertentu. “Saya perlu meluruskan, karena ada pemberitaan yang menuding Kemenag telah memakai DAU untuk memberangkatkan haji bagi para ulama, anggota DPR, wartawan, atau yang lainnya,” kata dia dalam jumpa pers di kantornya kemarin.

Suryadharma mengatakan, DAU dari tahun 2005 hingga 2010 belum dipakai sedikit pun. Menurut dia, DAU bisa digunakan, “Tapi harus dengan syarat-syarat yang sesuai dengan undang-undang.”

Dana Abadi Umat adalah dana hasil efisiensi dari total pembiayaan haji di tahun berjalan. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bachrul Hayat mengungkapkan, jumlah DAU hingga Juli 2010 sebesar Rp 1,7 triliun. “Disimpan sebagian besar di sukuk dan sisanya di bank,” tuturnya.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, DAU diperuntukkan bagi beberapa keperluan, seperti pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana.

Menurut Bachrul, DAU bisa digunakan untuk keperluan pembiayaan haji hanya

dalam keadaan darurat. “Misalnya mendekati pemberangkatan ada kejadian ekstrem sehingga harga-harga melonjak, DAU bisa dipakai,” ujarnya.

Pada 15 Juli lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga melaporkan dugaan gratifikasi dan pelanggaran kode etik Dewan Perwakilan Rakyat dalam pelaksanaan haji pada 2009 ke Badan Kehormatan DPR.

Menurut Kepala Divisi Politik ICW Abdullah Dahlan, keberangkatan haji rombongan Komisi VIII DPR, yang dibiayai Kementerian Agama melalui biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), adalah hal yang salah. ● IRIN AGUSTIA | ARIE FIRDAUS



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL
Jl. Gunungsitoli – Lahewa Km. 42 Kecamatan Lotu
LOTU

PENGUMUMAN RENCANA KEGIATAN YANG AKAN DILELANGKAN DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL KABUPATEN NIAS UTARA

Nomor : 640.1/ 1977 /PL/2010

I. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Nias Utara mengumumkan rencana akan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Utara TA. 2010 melalui Pelelangan Umum Pengadaan barang/jasa.

II. Rencana kegiatan yang akan dilelangkan sebagai Berikut :

NO	NAMA PEKERJAAN	KUALIFIKASI / GRED	KLASIFIKASI / KODE	PAGU DANA (RP.)
1.	Pembangunan Gedung Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten Nias Utara [DAK/DAU]	Non Kecil	21005	1,931,500,000
2.	Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar [DAK/DAU]	Non Kecil	Bahan Kimia, Bahan Baku Obat, Obat Jadi dan Farmasi	1,043,500,000

III. Demikian disampaikan untuk diketahui.

LOTU, 27 JULI 2010

Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Nias Utara
DTO
YAFETI NAZARA, S.Kep,M.Kep,NSpM